

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan keuntungan sangat penting untuk keberhasilannya, karena keuntungan merupakan bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerjanya. Untuk organisasi pemerintah, kinerja keuangan mereka dinilai baik apabila mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang direncanakan. Sebaliknya, apabila mereka menghasilkan lebih sedikit uang daripada yang direncanakan, kinerja mereka dinilai buruk. Sumber daya manusia adalah komponen tambahan yang dapat menunjukkan kualitas atau kualitas kinerja suatu perusahaan (Sanjaya, 2017). Sumber daya manusia adalah individu yang menyediakan fasilitas, pengetahuan, daya cipta dan upaya bagi manajemen asset organisasi. Sumber daya manusia yang berkinerja baik dapat meningkatkan keberhasilan suatu organisasi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah salah satu aset berharga yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengelola sistem tidak dapat memastikan bahwa suatu organisasi akan berhasil tanpa sumber daya manusia (Norawati et al., 2021). Menurut Risma & Arwiah (2022), sumber daya manusia harus diurus secara bertanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan tuntutan organisasi. Sumber daya manusia yang cukup mumpuni dan memadai merupakan syarat untuk perkembangan organisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hilminawati & Napisah (2023), Pada tahun 2020, pemungutan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka masih belum mencapai target sebesar Rp. 133.000.000.000, hanya menerima sebesar Rp. 119.000.000.000. dibandingkan tahun 2019, realisasi pendapatan turun cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 123.000.000.000. Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang pembayaran pajak,

sosialisasi yang belum merata. Selain itu, pembayaran pajak sering dilakukan secara manual serta dibayarkan secara langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah karena masyarakat kurang memahami pembayaran pajak secara *online*.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggungjawab untuk mengatur pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah. Ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mencakup administrasi dan tata usaha negara, otonomi dan pemerintahan daerah, dan struktur organisasi (Frans Bernie Kewetare, 2019). Menurut Norawati et al. (2021) Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemungutan pajak daerah serta bekerja sama dengan lembaga lain tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 111 Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah memiliki posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan tata kerja khusus untuk pelayanan asli daerah. Memastikan bahwa suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya dalam hal pelayanan, sumber daya manusia diperlukan sebagai pengelola sistem. Dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur rumah tangga. Badan Pendapatan Daerah juga dapat membuat kebijakan, seperti menyediakan layanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nova & Priyandini, 2020).

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, Badan Pendapatan Daerah mengedukasi orang tentang pentingnya membayar pajak, terutama pajak daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Baok et al., 2020). Menurut Arrasi (2022), semakin banyak pajak daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota, maka dapat membantu dan memfasilitasi sarana dan prasana masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah mengevaluasi seberapa mandiri pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya (Primandari & Dahlia, 2020). Pemerintah daerah mampu mengembangkan ekonominya sendiri seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Maka, pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan daerah yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa bebas daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu wilayah, maka akan lebih maju dan lebih baik kesejahteraan penduduknya (Makawaehe et al., 2023).

Pemerintah membuat rencana pelaksanaan jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai pembangunan nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, masalah pembiayaan pembangunan harus sangat diperhatikan. Pajak adalah cara untuk membuat daerah menjadi independen dalam pembiayaan pembangunan (Suoth et al., 2022). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Prabowo & Rafli, 2020).

Sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah yaitu pajak. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengendalikan perekonomiannya. Untuk mendukung hal tersebut, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 "Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" bertujuan meningkatkan tanggungjawab daerah, mengembangkan keterampilan warga setempat, dan mengintegrasikannya ke dunia bisnis. Setiap daerah dapat meningkatkan pendapatannya dengan memperoleh kewenangan yang lebih besar (Nirali, 2023). Sumbangan wajib yang sebesar-besarnya kebaikan daerah, pajak daerah diberikan oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa menerima imbalan yang sah secara langsung (Amelda et al., 2023).

Agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya, pendanaan yang cukup diperlukan untuk inisiatif pembangunan regional. Akibatnya, proyeksi

anggaran pemerintah daerah yang dibuat sebelumnya tidak terpenuhi secara tepat dalam kaitannya dengan realisasi pajak daerah. Pendapatan daerah yang tidak efektif akan timbul dari pemenuhan yang tidak tepat, sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah daerah selaku penghimpun (Suryaningsih, 2023).

Diharapkan bahwa pajak daerah dapat membantu sumber pembiayaan daerah melakukan pembangunan, yang akan meningkatkan dan meratakan perekonomian (Khasanah & Aldiyanto, 2023). Mengoptimalkan potensi yang ada dan mengidentifikasi sumber pendapatan baru yang memungkinkan pengumpulan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan dua strategi untuk meningkatkan efektivitas sumber daya dan fasilitas yang langka serta efektivitas pengumpulan pajak (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020).

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Dan hasil yang didapat berpengaruh terhadap objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dengan ini peneliti mengungkapkan bahwa untuk objek permasalahan tidak ada yang terfokus terhadap 1 (satu) tempat. Oleh sebab itu peneliti yang akan dilakukan terfokus terhadap 1 (satu) tempat yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk melihat secara objektif dan komprehensif untuk mengamati masalah yang peneliti angkat.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan melibatkan responden kepala badan yang menjadi pimpinan instansi. Dengan alasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka merupakan lembaga pemerintahan daerah pemisahan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) ditambah dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pada awal tahun 2017 dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan didirikan pada tahun 2019 (Dokumen, 2020). Saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka periode 2020 sampai 2022.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan kurang maksimal antara target anggaran yang sudah diterapkan dengan realisasi anggaran yang didapatkan.

2. Pelayanan yang kurang efektif karena kurangnya sumber daya manusia.

### **C. Batasan Masalah**

Menghindari permasalahan yang meluas, maka pembahasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas kinerja Badan Pendapatan Daerah kemudian mengukur efektivitas dalam peningkatan penerimaan pajaknya.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 sampai 2022?
2. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 sampai 2022?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020 sampai 2022.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu yang dibutuhkan selaku bidang akademik dalam hal pengetahuan lebih rinci mengenai efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian serupa serta dapat menjadi perbandingan untuk penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dan pengetahuan tambahan dalam bidang pendapatan daerah khususnya mengenai penerimaan pajak daerah.

- b. Bagi Lembaga

Adanya penelitian ini diharapkan membantu lembaga pemerintahan mengetahui tingkat efektivitas kinerja khususnya Badan Pendapatan

Daerah terutama sebagai masukan untuk pimpinan dan pegawai dalam rangka menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

### G. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah. Tujuan dari peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan perbandingan dan sebagai pedoman dasar untuk penelitian ini.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Hilminawati, Napisah (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka	Dengan menggunakan analisis parsial dan simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi pajak, dan penerimaan tanah dan bangunan di Kabupaten Majalengka dengan kategori sangat baik.	Persamaan Bapenda Kabupaten Majalengka  Perbedaan Metode Penelitian
2	Nova, Priyandini (2020)	Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013-2017	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dari tahun 2013 hingga 2017 belum memenuhi penerimaan pajak daerahnya berdasarkan analisis varians. Sementara itu, analisis pertumbuhan pendapatan dianggap baik, meskipun beberapa pajak belum dibayarkan.	Persamaan Kinerja Bapenda  Perbedaan Wilayah Penelitian dan Tahun Anggaran
3	Mahandra, Nurmalia, Hendri (2023)	Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palembang	Hasil penelitian yang menggunakan analisis varians dinyatakan sangat efektif. Namun, analisis pertumbuhan dalam penelitian ini dianggap kurang efektif.	Persamaan Kinerja bapenda dan metode analisis  Perbedaan Tahun analisis

		Periode 2014-2022		
4	Arfah (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran tidak terpenuhi, maka kinerja keuangan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dianggap tidak efektif.	Persamaan Badan Pendapatan Daerah  Perbedaan Kinerja Keuangan
5	Ariyanti & Yudhaningsih (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Gunungkidul DIY memiliki kemampuan yang efektif untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, rasio kontribusi daerah terhadap PAD rata-rata adalah 22,18%, yang menunjukkan bahwa rasio ini masih kecil.	Persamaan Efektivitas  Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah
6	Suoth, Morasa, Tirayoh (2022)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa	Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Minahasa sangat efektif dari tahun anggaran 2016 hingga 2019. Namun, karena pandemi COVID-19 penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2020 menjadi kurang efektif.	Persamaan Efektivitas dan Penerimaan Pajak  Perbedaan Tempat Penelitian
7	Sucianti, Pahmi, Nurdin, Indah (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan kriteria rasio efisiensi dan efektivitas, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah sangat efektif dan efisien.	Persamaan Penerimaan Pajak  Perbedaan Retribusi Daerah

8	Suryaningsih (2023)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar	Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sedang. Dengan demikian, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar masih sangat rendah.	Persamaan Pendapatan Asli Daerah  Perbedaan Kontribusi Pajak, Retribusi Daerah dan Metode Penelitian
9	Amelda, Salmah, Putra (2023)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Bapenda Kota Palembang	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2018–2022 sangat rendah.	Persamaan Pendapatan Asli Daerah dan Metode Penelitian  Perbedaan Kontribusi Pajak Hotel
10	Risma & Arwiah (2022)	Pengaruh Disiplin Kerja dan Etos Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	Berdasarkan hasil penelitian, disiplin kerja dan etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Bapenda Kota Bandung secara simultan dan parsial.	Persamaan Badan Pendapatan Daerah  Perbedaan Disiplin Kerja dan Etos Kerja

Dilihat dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai efektivitas kinerja badan pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten majalengka periode 2020-2022. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mengevaluasi kinerja badan pendapatan daerah.

#### H. Kerangka Pemikiran

Kata kinerja digunakan untuk mengukur prestasi atau tingkat keberhasilan dalam suatu kelompok, badan, atau instansi pemerintah. Pada kenyataannya, pemerintah pusat memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola

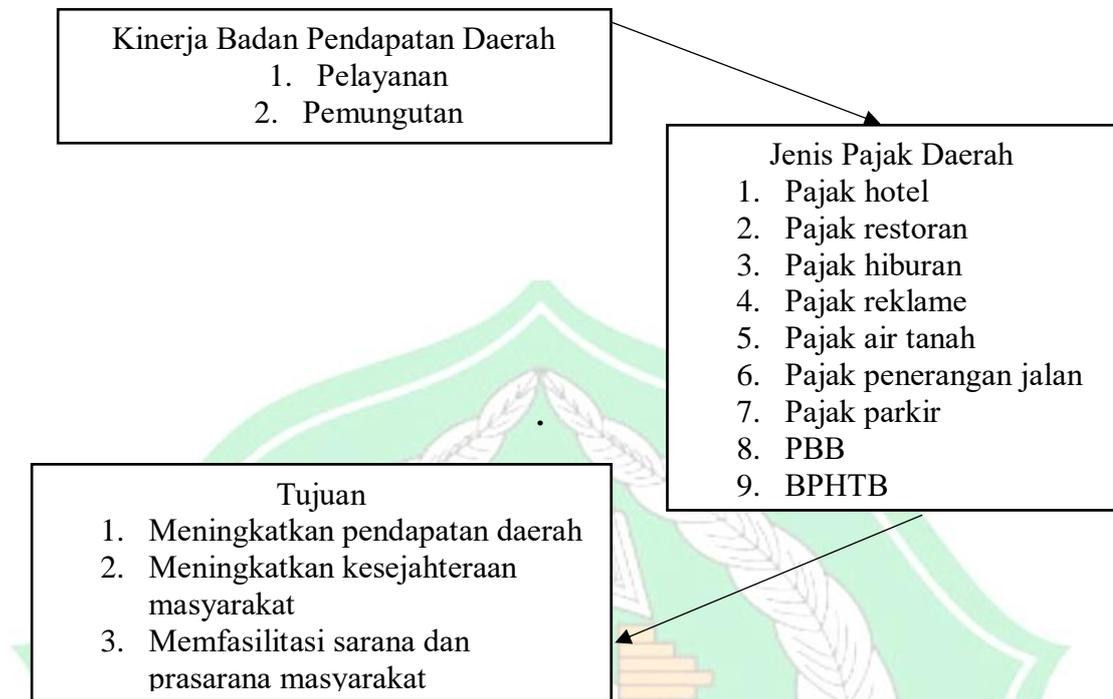
keuangannya sendiri. Ini termasuk mengeksplorasi potensi pendapatan daerah, yang telah ditetapkan dalam otonomi daerah (Khasanah & Aldiyanto, 2023).

Pemerintah Kabupaten Majalengka diharapkan mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah seiring berjalannya otonomi. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah telah memungut pajak daerah, menyediakan layanan mengenai pajak daerah dan melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah (Taras et al., 2017).

Dari sebelas bentuk pajak daerah, sembilang diantaranya merupakan penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan dua kategori pajak yang dikecualikan dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Majalengka. Hal ini dikarenakan produksi sarang burung walet di Kabupaten Majalengka diduga menurun, sehingga membuat sejumlah masyarakat mengajukan penghentian pemungutan pajak serta untuk pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri di Kabupaten Majalengka bukan sebuah daerah penghasil mineral sehingga tidak ada pendapatan untuk penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (Hilminawati & Napisah, 2023).

Pertumbuhan pendapatan akan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola wilayahnya. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah dapat mencapai tujuan meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan fasilitas (Saputra et al., 2019). Maka dari itu, peneliti mencoba menggambarkan hasil data yang didapat dalam gambaran kerangka berpikir yang diuraikan dibawah ini:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2024

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti temuan wawancara dan observasi (Wahidmurni, 2017). Penelitian empiris juga digunakan untuk menganalisis data keuangan sebagai tolak ukur efektivitas dalam persentase penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh (Wahidmurni, 2017).

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jalan Raya Jatiwangi – Cigasong, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 45476. Waktu penelitian yaitu pada bulan Desember sampai Januari 2023-2024.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian penentuan subjek penelitian, dilakukan sebelum peneliti memulai tahapan pengumpulan data (Adlini et al., 2022). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah.

### 5. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh dan didefinisikan sebagai benda atau orang yang berada di tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Jogiyanto Hartono, 2018). Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data. Peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti terkait dengan variabel minat untuk tujuan studi disebut data primer (Permana & Anggrainie, 2023). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang diberikan kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan oleh peneliti secara langsung mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

#### b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Jabnabillah et al., 2023). Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari hasil wawancara. Sumber data sekunder yang didapat oleh peneliti yaitu dokumen-dokumen atau data-data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Menurut (Mubarak, 2023), observasi adalah pencatatan dan pengamatan secara sistematis elemen yang menunjukkan suatu gejala atau gejala-gejala subjek penelitian. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang sedang berlangsung untuk mengetahui secara langsung bagaimana Badan Pendapatan Daerah yang dihasilkan objek penelitian.

### b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada orang yang akan diwawancarai. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dari subjek secara langsung dan mudah dipahami (Afriani, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara pihak terkait, diantaranya:

Tabel 1.2  
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Aeron Randi, A.P., M.P	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	Aan Yuningsih, SE	SUB Bagian Umum dan Keuangan
3	Heri Herwandi, S.Ap	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Sumber: Data diolah, 2024

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen yang diperlukan, seperti dokumen tertulis, seperti rekapitulasi penerimaan pajak (Ramadani, 2023). Peneliti mengaitkan teknik ini sebagai pelengkap dari teknik yang sudah dipaparkan diatas dengan menggunakan data yang didapatkan langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Selain itu, jurnal-jurnal maupun artikel penelitian terdahulu menjadi bagian didalamnya.

## 7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian yang dilakukan memang diperlukan. Jika hasil penelitian tidak berbeda dengan fakta di lapangan, penelitian itu tidak valid. Data divalidasi untuk memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar penelitian ilmiah. Lincoln dan Guba memberikan beberapa standar keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Standarnya antara lain Standar *Kredibilitas*, Standar *Transferabilitas*, Standar *Dependabilitas*, dan Standar *Konfirmabilitas* (Ritonga, 2019).

### a. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi berarti menguji data dari berbagai sumber dengan cara dan penjelasan sebagai berikut (Dr. Umar Sidiq, M.Ag, Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019):

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data, pengecekan data dari berbagai sumber dapat dilakukan. Peneliti menganalisis data dari berbagai sumber untuk sampai pada kesimpulan serta mencapai kesimpulan. Peneliti juga harus memastikan bahwa tiga sumber data setuju satu sama lain (Sidiq et al., 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti arsip, dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi.

#### 2) Triangulasi Teknik

Metodologi triangulasi merupakan metode penilaian kredibilitas data yang menguji data pada sumber data yang sama dengan menggunakan beberapa metode. Karena data dihasilkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara maka data dievaluasi dalam penelitian ini. Peneliti akan terus berkonsultasi dengan sumber data terkait untuk memastikan data mana yang dianggap akurat (Permata & Azmi, 2020). Dengan mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki perspektif yang berbeda untuk memperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

### 3) Triangulasi Waktu

Metode triangulasi menurut (Bungin, 2016) merupakan teknik triangulasi yang lebih berfokus pada efisiensi proses dan hasil yang diinginkan. Karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji proses dan hasil dari metode yang digunakan. Selain itu, dapat dilakukan triangulasi dengan memeriksa bagaimana peneliti memahami apa yang dikatakan informan. Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan metode seperti observasi dan wawancara dalam berbagai kondisi dan waktu. Pengecekan ini dilakukan berulang kali sampai data menjadi konsisten. Peneliti menggunakan waktu ketika pagi dan siang.

### 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data dengan menggunakan Model Miles dan Hubberman. Dalam model analisis data menggunakan model ini dengan beberapa bagian atau tahapan. Secara garis besar tahapan-tahapan seperti reduksi data, penyajian data, tahap kesimpulan. Semua tahapan ini berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung (Saleh, 2017). Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

#### a. Reduksi Data

Proses reduksi data terdiri dari pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang relevan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

#### b. Penyajian Data

Setelah pengumpulan dan reduksi data selesai, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian, bagan, flowchart, diagram hubungan antar

kategori, dan sebagainya. Informasi yang dikumpulkan akan diuraikan secara objektif.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis data tersebut menggunakan teori-teori yang relevan, kesimpulan dibuat. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang seberapa efektif kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## J. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori, pada bagian ini berisi tentang teori efektivitas dan Badan Pendapatan Daerah kemudian dikembangkan oleh peneliti.

Bab 3 Gambaran Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang sejarah, visi dan misi, tujuan serta struktur organisasi, fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah serta tingkat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah peneliti mengenai hasil yang diperoleh.

Bab 5 Kesimpulan, berisi kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari peneliti yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.